



PERAN APIP DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

“Rapat Koordinasi Nasional Bidang Hukum
Seluruh Indonesia”

Royal Kuningan Hotel, 8 Agustus 2024

Oleh:

Ir. Yosephus Nugroho Susprianto, M.Si

PPUPD Ahli Utama - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri





“ Peran pengawasan SANGAT PENTING, kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun kebawah. **Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat.**”

Disampaikan pada Rakornas Pengawasan Intern 2023

APIP FOKUS KEPADA HASIL PENGAWASAN

PEMDA MEMBERIKAN AKSES PENGAWASAN

PERKUAT PENGAWASAN INTERNAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

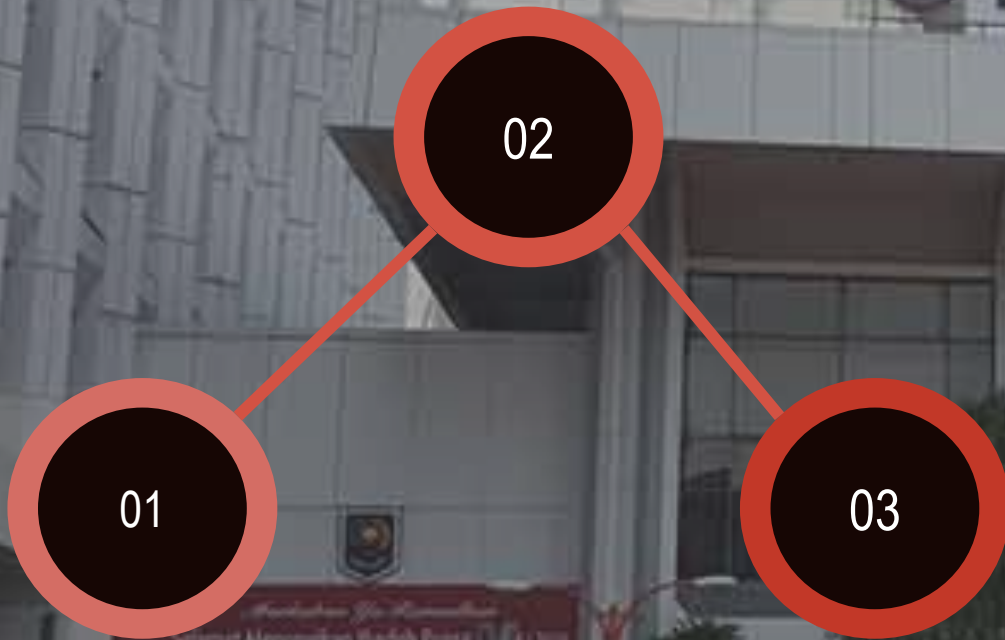
Presiden Republik Indonesia

“ **APIP** sebagai **tulang punggung dan garda terdepan** dalam **pengawasan** penyelenggaraan pemerintahan daerah.



TITO KARNAVIAN
Menteri Dalam Negeri

OUTLINE



01

ANATOMI BINWAS PEMDA

02

ATRIBUSI PERAN APIP

03

RENBINWAS 2024



#01



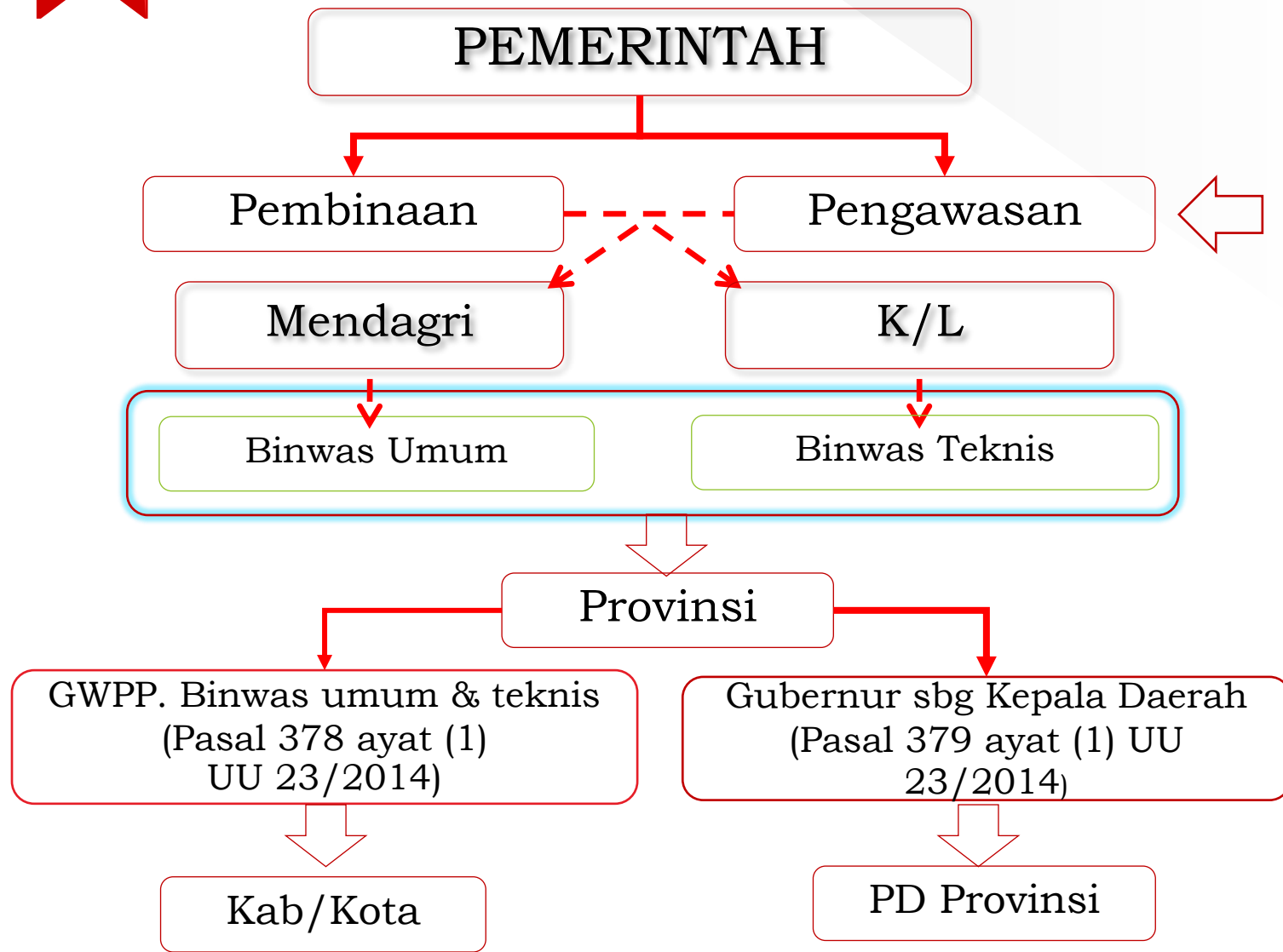
**ANATOMI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA

Manajemen Pemda
Secara Nasional



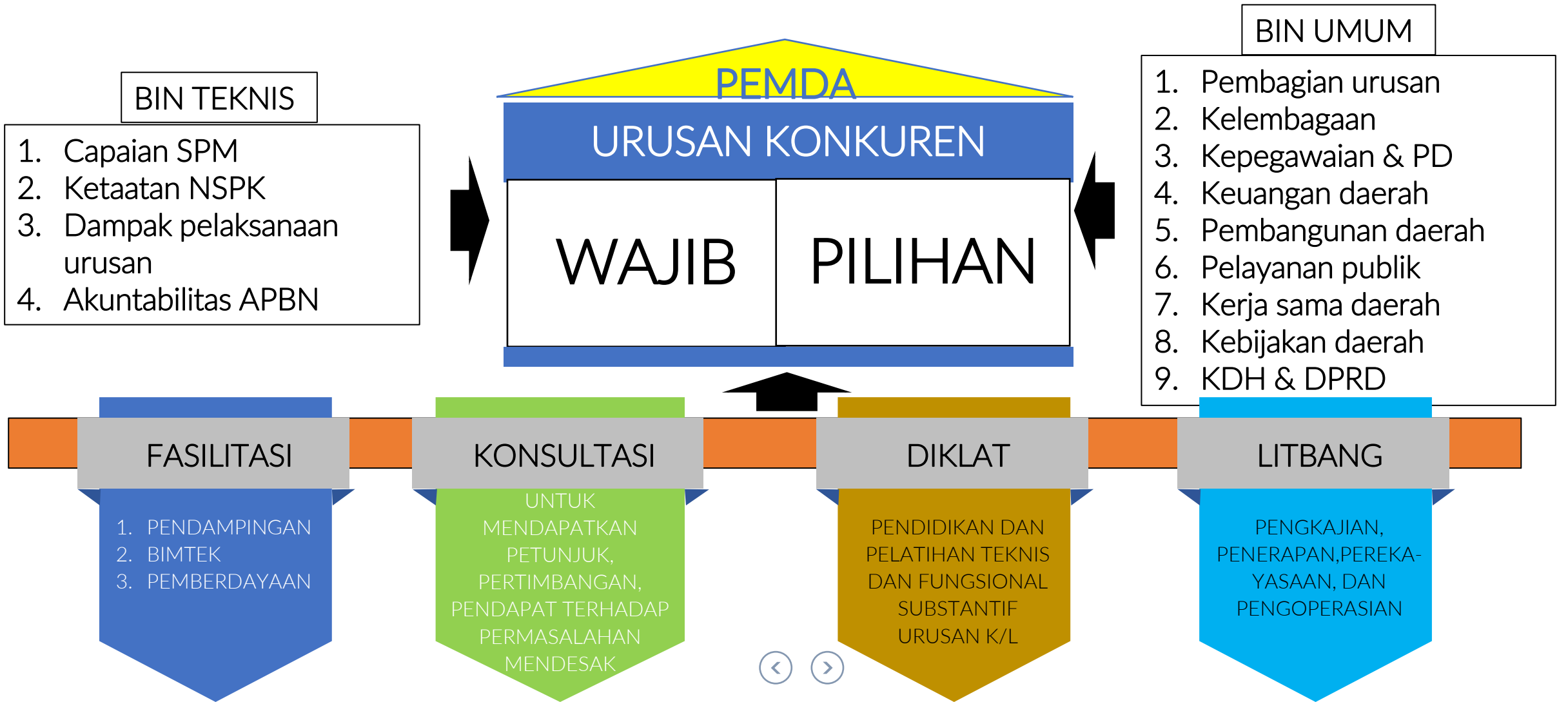
PASAL 8 ayat (3)
BINWAS Secara Nas.
dikoordinasikan Mendagri

PASAL 379 ayat (2)
BINWAS dibantu
Inspektorat Provinsi

1	Presiden
38	Gubernur
416	Bupati
98	Walikota
7.230	Camat
8.488	Lurah
74.961	Kades

RUANG LINGKUP PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemda



RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA

WAS TEKNIS

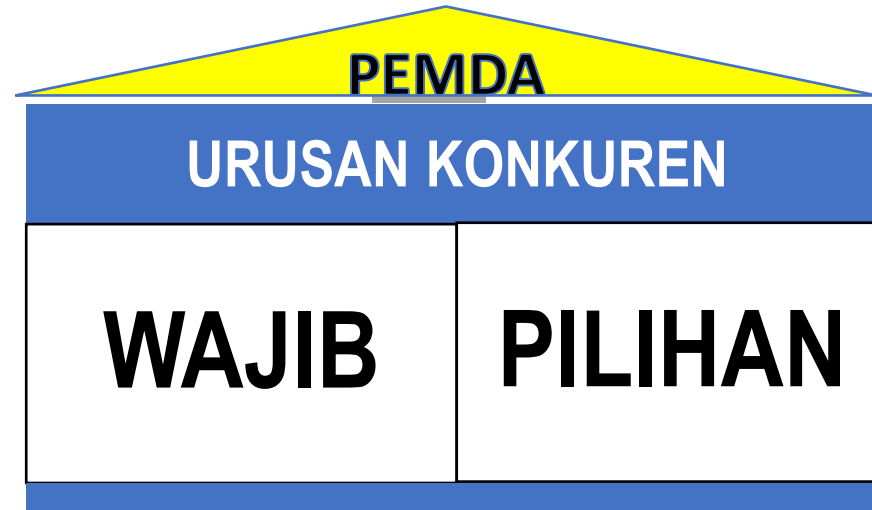
1. Capaian SPM
2. Ketaatan NSPK
3. Dampak pelaksanaan urusan
4. Akuntabilitas APBN

BINWAS KDH THD OPD

1. Pelaksanaan urusan
2. Pelaksanaan TP APBD
3. Ketaatan NSPK
4. Akuntabilitas APBD

WAS UMUM

1. Pembagian urusan
2. Kelembagaan
3. Kepegawaian & PD
4. Keuangan daerah
5. Pembangunan daerah
6. Pelayanan publik
7. Kerja sama daerah
8. Kebijakan daerah
9. KDH & DPRD



1. Penyusunan dok ren & anggaran
2. Pelaksanaan Bin
3. Program stranas di daerah
4. PAMJAB
5. Pemeriksaan tujuan tertentu

(Psl 16 ayat (3))

Was dilakukan o/ APIP
Kompetensi Pengawasan Urusan
(Psl 10 ayat (12) & Psl 16)

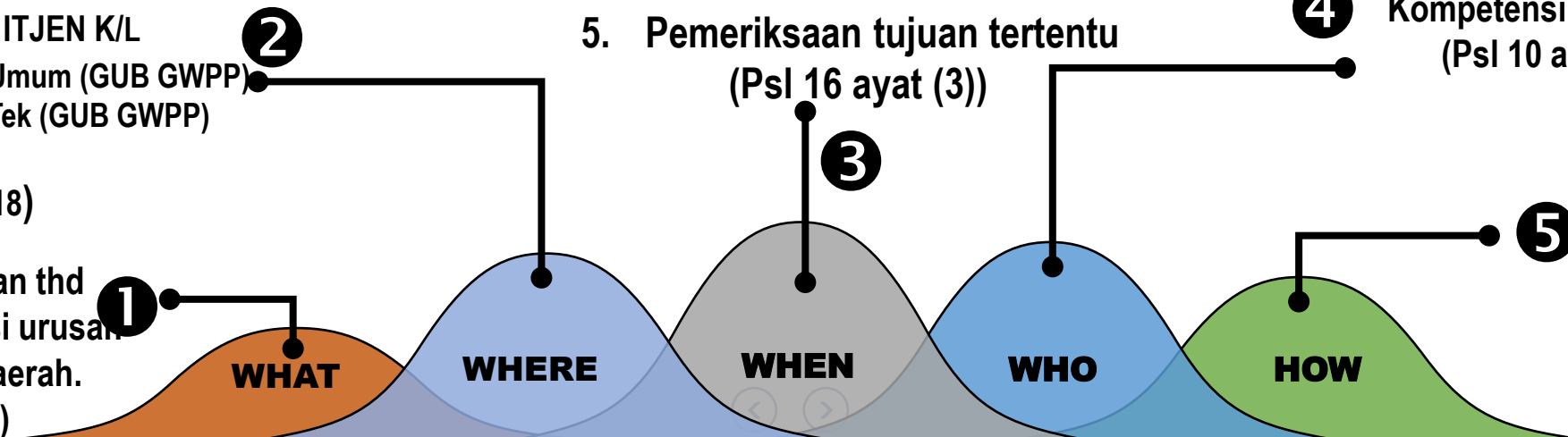
5 Reviu, Pemeriksaan,
Monitoring &
Evaluasi

PROV : 1. WAS Umum : ITJEN DAGRI
2. WAS Tek : ITJEN K/L

KAB/KOTA : 1. WAS Umum (GUB GWPP)
2. WAS Tek (GUB GWPP)

Binwas OPD : ITDA
(Psl 10 ayat (1) j.o Psl 18)

Was Teknis dilakukan thd
pelaksanaan substansi urusan
yg diserahkan ke daerah.
(Psl 10 ayat (3))





#02



**PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**





Pengawasan APIP terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah



Dokumen RKPD

APIP melakukan **Binwas** atas Dokumen RKPD, **melalui upaya:**

1. Reviu RKPD dan RKPD Perubahan setiap tahunnya; dan
2. Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan melalui Reviu RKPD.

Pokok Pikiran

APIP melakukan **Binwas** atas Pokok Pikiran Legislatif, **melalui upaya:**

1. Memastikan Pokir diinput melalui SIPD RI;
2. Pokir yang berbentuk Hibah dan Bansos disertai proposal;
3. Memonitoring OPD Teknis untuk mengawasi pelaksanaan Pokir.



Pengawasan APIP terhadap Kebijakan Penganggaran Daerah



01

APIP melakukan Upaya pencegahan *markup* Anggaran melalui penetapan Standar Harga Satuan (SHS)

APIP memastikan ketepatan waktu Penyerahan dan Penetapan APBD dan/atau APBD Perubahan

APIP melakukan Reviu terhadap kesesuaian SHS dalam menu Analisis Standar Biaya (ASB), dan memastikan Pemda menggunakan ASB sebagai dasar harga kegiatan

02

03

APIP memastikan Pemda tepat waktu dalam penyampaian dan penetapan Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah dan DPRD melalui SIPD RI

APIP melakukan Monitoring Publikasi APBD kepada masyarakat melalui website Pemda/Media Cetak/Elektronik

APIP melakukan Reviu RKA untuk memastikan kesesuaian RKA dengan RKPD melalui SIPD RI (E-Reviu)

04

APIP melakukan Pengendalian dan Pengawasan berupa Audit terhadap Bantuan Keuangan/Hibah/Bansos/ untuk mencegah kegiatan Fiktif



Pengawasan APIP terhadap Kebijakan Pelayanan Publik



TRANSPARANSI TATA RUANG

PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SOP PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENCEGAH PUNGLI/PENYUAPAN/GRATIFIKASI

OPTIMALISASI DPMPTSP UNTUK MEMINIMALKAN PERTEMUAN LANGSUNG ANTARA PEMOHON DENGAN OPD TEKNIS

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI PERIZINAN ONLINE

MENYELENGGARAKAN FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT UNTUK MENJARING HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

MENYEDIAKAN MEDIA PENGADUAN MASYARAKAT UNTUK MENYAMPAIKAN KELUHAN/KETIDAKSESUAIAN TERHADAP SOP



Pengawasan APIP terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah



Alokasi Anggaran
Sertifikasi BMD

Pemanfaatan
BMD untuk
Pemda

Rekonsiliasi &
Inventarisasi
BMD

Tindak Lanjut
Temuan Pemeriksaan
Terkait BMD



Pembangunan
Database
BMD yang handal

Penguasaan
Fisik BMD

Penyusunan
RKBMD tepat
waktu

Penertiban
BMD

Pencegahan
BMD digunakan
Kepentingan Pribadi



Pengawasan APIP terhadap Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah

Regulasi Tata Kelola Pajak Daerah

Revisi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKP

Database Pajak Daerah Terintegrasi

Tersedianya database pajak daerah yang akurat, sehingga digunakan untuk penetapan KUA, PPAS, APBD dan APBDP

Pembayaran Online

APIP melakukan Pengawasan terhadap SOP Pembayaran Pajak secara online melalui lembaga perbankan, rekapitulasi jenis pajak daerah yang sudah online



Inovasi Pajak Daerah

Pengawasan terhadap Upaya Pengembangan Inovasi dalam rangka peningkatan Pajak Daerah

Target Pajak

APIP melakukan pengawasan terhadap target Pajak dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan

Reviu Optimalisasi Pajak Daerah

Penguatan database Pajak
Upaya Penagihan Pajak
Pengawasan dan Pemeriksaan
Wajib Pajak



FUNGSI KOORDINATOR BINWAS MENDAGRI (PP 12/2017)

01 MENTERI K/L DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TEKNIS BERKOORDINASI DENGAN MENDAGRI (PASAL 10)

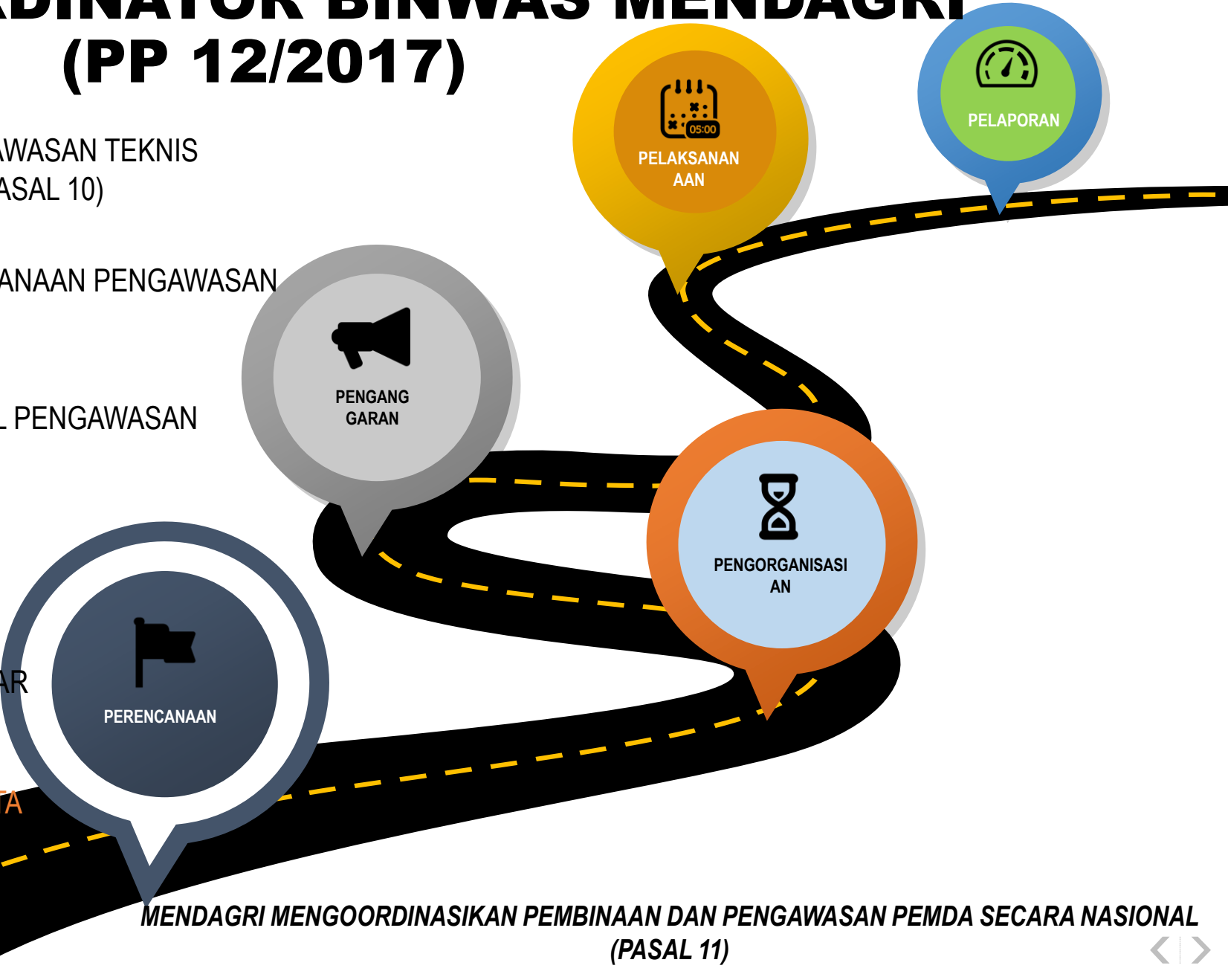
02 MDN MENETAPKAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGAWASAN 5 TAHUNAN DAN TAHUNAN (PASAL 12)

03 MDN MELAKUKAN HARMONISASI JADWAL PENGAWASAN /PKPT (PASAL 13)

04 PEMDA WAJIB MENCANTUMKAN BINWAS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN (PASAL 14)

05 MDN KOORDINASI PENYUSUNAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN PEMDA (PASAL 24)

06 MDN MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP 2 KALI DLM 1 TAHUN (PSL 28)



MENDAGRI MENGOORDINASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA SECARA NASIONAL (PASAL 11)



APIP PENGAWASAN TERHADAP SANKSI ADMINISTRATIF (UU 23/2014 & PP 12/2017)

No	LARANGAN	Subyek dikenakan sanksi				Jenis Sanksi										Pasal UU 23/14	
						Teguran tertulis	Teguran II	Binsus	Tidak Dibayarkan hak keu		Pembertentian sementara	Pembertentian	DAU/DBH	Ambil Alih	Tunda evaluasi		
		3 bulan	6 bulan														
		KDH	WKLKDH	DPRD	Daerah												
1	TIDAK MENJALANKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	●	●			●	●					●	●				68
2	TIDAK MENYAMPAIKAN LPPD DAN RINGKASAN LPPD	●				●	●	●									73
3	TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ KPD DPRD	●				●	●	●									73
4	MENJADI PENGURUS PERUSAHAAN	●	●									●					77
5	PERJALANAN LUAR NEGERI TANPA IZIN MDN	●	●									●					77
6	MENINGGALKAN TUGAS DAN WILAYAH KERJA 7 HARI ATAU BERTURUT-TURUT DLM 1 BULAN	●	●			●	●	●									77



#03



**RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024**



Kerangka Logis Renbinwas 2024 (PMDN No. 19 Tahun 2023)

Arah Kebijakan dan Strategi Prioritas Nasional

- Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Penurunan prevalensi stunting
- Pengangguran terbuka
- Pengendalian inflasi
- Peningkatan investasi
- Penguatan daya saing usaha
- Percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- Pelaksanaan Pemilu 2024
- Penguatan Tata Kelola Pemerintah

Prioritas Nasional

- Ketahanan Ekonomi
- Pengembangan wilayah
- Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Infrastruktur
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

RKP 2024

Aspek Umum (yang relevan dengan PN)
+
Aspek Umum (Kebijakan Menteri)

Sasaran

Fokus

Aspek Teknis (per urusan pemerintahan sesuai PN)
+
Aspek Teknis (NSPK)

Sasaran

Fokus

Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Sasaran

Fokus

Renbinwas 2024



ASPEK PERENCANAAN BINWAS UMUM 2024

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Tercapainya target tingkat kemiskinan 6,5%-7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%	Efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Keandalan data kemiskinan Perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2.	Penurunan prevalensi stunting	Tercapainya target prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) sebesar 14%	Integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Realisasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai ketentuan
3.	Pengangguran terbuka	Tercapainya target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5%-7,5%	Keandalan data pengangguran terbuka Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ASPEK PERENCANAAN BINWAS UMUM 2024

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
4.	Pengendalian inflasi	Tercapainya target laju inflasi sebesar 1,5%-3,5% secara year on year	<p>Integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan pasokan b. Keterjangkauan harga c. Kelancaran distribusi <p>Kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi:</p>
5.	Peningkatan investasi	Tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2%-7,0%	<p>Deregulasi di bidang investasi</p> <p>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha</p> <p>Sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha</p>
6.	Penguatan daya saing usaha	Tercapainya target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,23%	<p>Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas teknologi informasi pendukung iklim usaha</p> <p>Modernisasi dan penerapan korporasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha</p>



ASPEK PERENCANAAN BINWAS UMUM 2024

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN	FOKUS
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur layanan dasar Kerja sama antar daerah terkait konektivitas untuk menunjang aktivitas perekonomian
8.	Pelaksanaan Pemilu 2024	Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas ASN	Ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan pemilu 2024 Diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat Pembinaan netralitas ASN
9.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif	Penguatan pelayanan publik Penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa Penguatan kualitas APBD Penguatan kinerja BUMD

1 Kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk

- Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Pemeriksaan Keinerja:

- pengendalian inflasi daerah;
- kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- tingkat pengangguran terbuka;
- investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- penanganan stunting.

3 Penguatan tata Kelola pemerintahan

▪ Pengendalian Gratifikasi

- Pelaksanaan SPI

▪ PMPRB

- Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar

- Capaian aksi pencegahan korupsi

- Pemeriksaan Investigatif

2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah



4 Peningkatan kapabilitas APIP

- Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level III
- Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Penerapan Manajemen Risiko
- Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun



NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU

TERIMA KASIH

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



@itjenkemendagri.ri



Inspektorat Jenderal Kemendagri

#ItjenBerintegritas
#SatuDataSatuKata
#ItjenHebat

